



Semua Sekolah Akan Menjadi Sekolah Inklusi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta semakin serius menggarap sekolah inklusi. Tak tanggung-tanggung, dalam tiga hingga empat tahun lagi ditargetkan seluruh sekolah di Yogyakarta menjadi sekolah inklusi.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, jumlah sekolah inklusi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari semula hanya sembilan sekolah, kini total terdapat 36 sekolah inklusi di wilayah kota, ditambah enam PAUD inklusi.

"Tujuan akhir kami memang menjadikan semua sekolah di Yogyakarta sebagai sekolah inklusi," ujar Edy, Rabu (4/12).

Sekolah inklusi yang dimaksud adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan reguler dan pendidikan khusus di bawah satu atap. Anak berkebutuhan khusus (ABK) seperti *slow learner* dan siswa dengan ketidaksempurnaan motorik mendapat layanan pendidikan khusus sesuai potensi masing-masing. Sementara siswa reguler mendapat pendidikan seperti pada umumnya, ditambah layanan khusus untuk mengembangkan potensinya.

Edy menyebut, saat ini terdapat sekitar 80 Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah-sekolah inklusi di Yogyakarta. Idealnya, menurut Edy, perbandingan jumlah GPK dengan ABK yaitu satu banding satu. Artinya satu GPK mendampingi satu ABK.

Jumlah sekolah inklusi di Kota Pelajar saat ini mencapai 36 sekolah, yang terdiri dari SD berjumlah 17 sekolah, SMP empat sekolah, SMA tujuh sekolah, dan SMK delapan sekolah. Ada pula enam PAUD atau TK inklusi.

Edy menyebut, besarnya kebutuhan GPK menjadi kendala utama yang dihadapi pihaknya untuk mewujudkan tujuan mengonversi semua sekolah di Yogyakarta menjadi sekolah inklusi. Ia menyebut pihaknya masih terus berupaya menggenjot pengadaan GPK baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Pengadaan GPK, lanjut Edy, dapat ditempuh menggunakan beberapa cara.

GPK dapat berasal dari guru kelas alias guru reguler yang mendapat pelatihan khusus, guru SLB, para lulusan perguruan tinggi jurusan pendidikan khusus, serta dari masyarakat yang menjadi relawan.

Para relawan yang berkarya sebagai GPK menyangkut status sebagai tenaga honorer yang dibiayai oleh orang tua siswa.

"Kami upayakan agar dari Dinas Pendidikan bisa menopang penghasilan para relawan tersebut," katanya.

Sementara tenaga pengajar dari SLB juga tidak bisa terlalu diandalkan. Tugas mereka di SLB saja sudah cukup berat sebelum ditambah membantu sebagai GPK di sekolah inklusi. "Hebat, para guru SLB itu masih bersedia meluangkan waktu untuk membantu," ujar Edy.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof Wuryadi, masih ada banyak hal yang perlu disiapkan sebelum mengubah semua sekolah di Yogyakarta menjadi sekolah inklusi. "Secara politis memang mudah dikatakan, tapi pelaksanaan teknis masih perlu banyak persiapan," katanya.

Ia menyebut, kelebihan sekolah inklusi yang menyatukan siswa difabel dengan siswa normal yaitu menimbulkan dorongan moral bagi siswa difabel. Para siswa berkebutuhan khusus itu akan merasa mendapat perlakuan yang setara.

Di sisi lain, para guru dituntut untuk memiliki kemampuan dan tenaga ekstra. Pasalnya, ABK tidak dapat dibimbing menggunakan cara konvensional.

Lebih jauh, Wuryadi mengatakan, konsep sekolah inklusi masih banyak dianggap terlalu sempit. Selain menyatukan siswa normal dan difabel, sekolah inklusi juga idealnya menyatukan mereka yang mampu dan yang tidak mampu.

Menurutnya, kemampuan tersebut juga meliputi kemampuan ekonomi dan akademis. "Masih sedikit sekolah yang mau menerima siswa yang tidak mampu secara akademis. Padahal mereka juga warga negara yang haknya untuk memperoleh pendidikan dijamin oleh UUD," ujar pengamat pendidikan itu. (nbi)

Tujuan akhir kami memang menjadikan semua sekolah di Yogyakarta sebagai sekolah inklusi

EDY HERI SUASANA
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005